



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EEN RUKMINI
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 196379

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.178.050.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah Seluas 473 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 165.550.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 431 m2/300 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 600.850.000		
4. Tanah Seluas 517 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 180.950.000		
5. Tanah Seluas 1588 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 397.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/35 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000		
7. Tanah Seluas 1289 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 386.700.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.222.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.948.417



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.337.220.417

III. HUTANG

Rp. 535.951.604

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.801.268.813

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.